

## Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa pada Desa Satriyan Kabupaten Batang

Miftahurrohman<sup>1</sup>, Suci Kurniawati<sup>2</sup>, Laksamana Rajendra Haidar AF<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Jl. Majapahit No. 605 Semarang, e-mail: miftah@stekom.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Jl. Majapahit No. 605 Semarang, e-mail: sucikurniawati637@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Jl. Majapahit No. 605 Semarang, e-mail: laksamanahaidar@stekom.ac.id

### ARTICLE INFO

Article history:

Received : 02 – Januari - 2023

Received in revised form : 10 – Januari - 2023

Accepted : 16 – Januari- 2023

Available online : 25 – Januari - 2023

### ABSTRACT

The Village Financial Management Information System is needed as a solution for the village government in carrying out its functions. Especially in village financial management. This is based on village needs, where village financial management still uses the conventional model, namely planning a budget by writing it on a book and continuing with recording on the Ms. office application. Excel and the difficulty of data search processes, reporting systems. The arrangement of information that is carried out regularly, clearly, precisely and quickly and can be presented in applications and reports certainly greatly supports the smooth running of village government operations. By utilizing information technology the village government can interact and exchange information with residents and with other village governments so as to facilitate the running of the village government in providing services and information to the community.

**Keywords:** Information System, Village Financial Management, APBDesa

### Abstrak

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa diperlukan sebagai solusi untuk pemerintah desa dalam melaksanakan fungsinya. Khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini didasarkan pada kebutuhan desa, dimana pengelolaan keuangan desa masih menggunakan model konvensional yaitu merencanakan anggaran dengan penulisan pada buku dan diteruskan dengan pencatatan pada aplikasi *office Ms. Excel* serta sulitnya proses pencarian data, sistem pelaporan. Penataan informasi yang dilakukan secara teratur, jelas, tepat dan cepat serta dapat disajikan dalam aplikasi dan laporan tentunya sangat mendukung kelancaran kegiatan operasional pemerintahan desa. Dengan memanfaatkan teknologi informasi pemerintah desa dapat berinteraksi dan bertukar informasi dengan warga dan dengan pemerintahan desa lain sehingga mampu memperlancar jalannya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat.

Kata kunci : Sistem Informasi, Manajemen Keuangan Desa, APBDesa

## 1. PENDAHULUAN

Sejak bergulirnya kebijakan pemerintah pusat tentang dana desa pada tahun 2015 sebagai konsekuensi dikeluarkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenang penuh untuk mengatur rumah tangganya sesuai dengan potensi yang dimiliki desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Begitu banyak manfaat atas dana desa dapat dirasakan secara langsung dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa. Namun demikian pengelolaan dana desa masih menimbulkan berbagai masalah dan tantangan. Beberapa masalah dana desa seperti dugaan pengelolaan tidak transparans, mark-up atas transaksi belanja, fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa. Adanya masalah ini potensi mengakibatkan krisis kepercayaan kepada kepala desa.

Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Anggaran merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari program kerja maupun perencanaan, dengan adanya perincian dari perencanaan maka dengan demikian pemerintahan Desa akan lebih mudah mengarahkan jalannya pembangunan pemberdayaan masyarakat yang telah di rencanakan [1]. Untuk itu pemerintahan desa memerlukan rancangan anggaran pendapatan belanja Desa (RAPBDes).

Desa merupakan suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri [2]. Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang merupakan instansi pemerintahan yang beralamat di Jl. Utama Satriyan – Bulu Km. 01 Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

Proses penyusunan serta pelaporan anggaran dan belanja desa, Desa Satriyan sudah menggunakan sistem informasi akuntansi akan tetapi dirasa kurang efektif dan efisien karena masih banyak masalah yang terjadi seperti, sekretaris desa terkadang tidak mencatat pengeluaran ataupun pendapatan keuangan desa sehingga mempersulit dalam penyusunan laporan keuangan. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang efektif perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa [3], namun banyak Sumber Daya Manusia di kantor kelurahan Desa Satriyan yang usianya sudah mencapai 50 tahun keatas dan dirasa sudah tidak produktif lagi sehingga kurang begitu memahami mengenai program informasi akuntansi. Dalam pemberian informasi keuangan dengan desa lain dirasa juga kurang transparan karena dalam penataan informasi belum dilakukan secara teratur, jelas dan cepat. Kantor Desa Satriyan juga masih menggunakan pencatatan didalam tiga buku besar, yaitu buku penerimaan, buku pengeluaran dan buku penerimaan.

Kemajuan teknologi informasi, telah memungkinkan pengembangan sistem informasi yang semakin handal. Penataan informasi yang dilakukan secara teratur, jelas, tepat dan cepat serta dapat disajikan dalam aplikasi dan laporan tentunya sangat mendukung kelancaran kegiatan operasional pemerintahan desa. Dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis *web* pemerintah desa dapat berinteraksi dan bertukar informasi dengan warga dan dengan pemerintahan desa lain sehingga mampu memperlancar jalannya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem informasi anggaran, pendapatan dan belanja desa yang dapat membantu memudahkan Bendahara desa menghasilkan informasi yang lebih efektif dan efisien, dan menghasilkan laporan pengelolaan keuangan desa sehingga penyajian laporan APBDesa lebih teratur, jelas, cepat dan tepat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Sistem Informasi

Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan atau untuk mengendalikan organisasi [4]. Sistem informasi menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada *value chain* secara efektif dan efisien. sehingga mampu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi dan jasa yang dihasilkan serta meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan dalam hal pengambilan keputusan dan menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan [5]

### 2.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, bahwa Keuangan Desa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Adapun Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat [6]. Dana desa bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten [7]. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan berdasarkan atas prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran. Penggunaan dana desa harus benar-benar digunakan dan dikelola dengan hati-hati dan tepat sasaran [8]. Pengelolaan Keuangan Desa harus lebih efektif perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa khususnya kepala desa, kepala urusan keuangan desa dan tim pelaksana kegiatan serta menyampaikan aspirasi pemerintah desa ke pemerintah pusat [3]. Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan yang mengatur keuangan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, yang didalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

### 2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa [3]

Anggaran merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari program kerja maupun perencanaan, dengan adanya perincian dari perencanaan maka dengan demikian pemerintahan Desa akan lebih mudah mengarahkan jalannya pembangunan pemberdayaan masyarakat yang telah di rencanakan [1].

Pendapatan Desa menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih [9]. Pendapatan desa yang tersebut dikelompokkan atas : Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, dan Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa[10].

Belanja desa, meliputi pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari : Belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal) dan Belanja tidak langsung (belanja pegawai penghasilan tetap, belanja sosial, belanja hibah (pembatasan hibah), belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga) [3].

Klasifikasi belanja untuk tujuan pelaporan keuangan dikelompokkan menjadi : Belanja operasi, Belanja modal, Belanja lain-lain tak terduga, Belanja transfer keluar [9].

Didalam penyusunan APBDesa, maka terdapat beberapa hal yang menjadi prinsip yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut : APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, APBDesa harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal, Penyusunan APBDesa dilakukan secara transparan yang memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa, Penyusunan APBDesa harus melibatkan partisipasi masyarakat, APBDesa harus

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, Substansi APBDesa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya .

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau *Research and Development (R&D)*. Metode R&D merupakan metode penelitian untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut [11]. Langkah-langkah metode R&D terdiri dari sepuluh tahapan, namun demikian dalam penelitian ini hanya menggunakan enam tahapan, hal ini karena produk yang dihasilkan berupa *prototype*, adapun tahapan tersebut yaitu : potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, ujicoba pemakai, dan revisi produk.

#### **3.1. Potensi Dan Masalah**

Penelitian di latar belakang adanya potensi dan masalah, potensi yang dimiliki adalah keberadaan usaha kecil dan menengah yang turut andil dalam perekonomian nasional, dan permasalahan yang ada adalah pengelolaan aset tetap dilakukan dengan cara konvensional yang mana banyak kelemahan-kelemahan yang digunakan saat ini.

#### **3.2. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk analisis kebutuhan dalam menghasilkan produk, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Observasi, Interview, Studi literatur

#### **3.3. Desain Produk**

Desain produk yang penulis siapkan untuk merancang sistem informasi dimulai dari menyiapkan rancangan sistem dengan menggunakan aplikasi berbasis web, XAMPP sebagai server side, bahasa pemrograman PHP, perancangan database seperti *flowchart*, DFD (*Data Flow Diagram*), *normalisasi*, ERD (*Entity Relationship Diagram*), dan desain interface.

#### **3.4. Validasi Desain**

Uji validasi desain ini dilakukan oleh pengguna langsung untuk memperoleh informasi apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan pemakai atau belum, validasi juga dilakukan oleh validator pakar yang bertujuan untuk menilai apakah rancangan produk yang baru lebih efektif dari yang lama atau tidak.

#### **3.5. Perbaikan Desain**

Sebagai respon atas masukan hasil validasi desain, maka perbaikan dilakukan. Berbagai kekurangan yang merupakan masukan dari validator di laksanakan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pemakai.

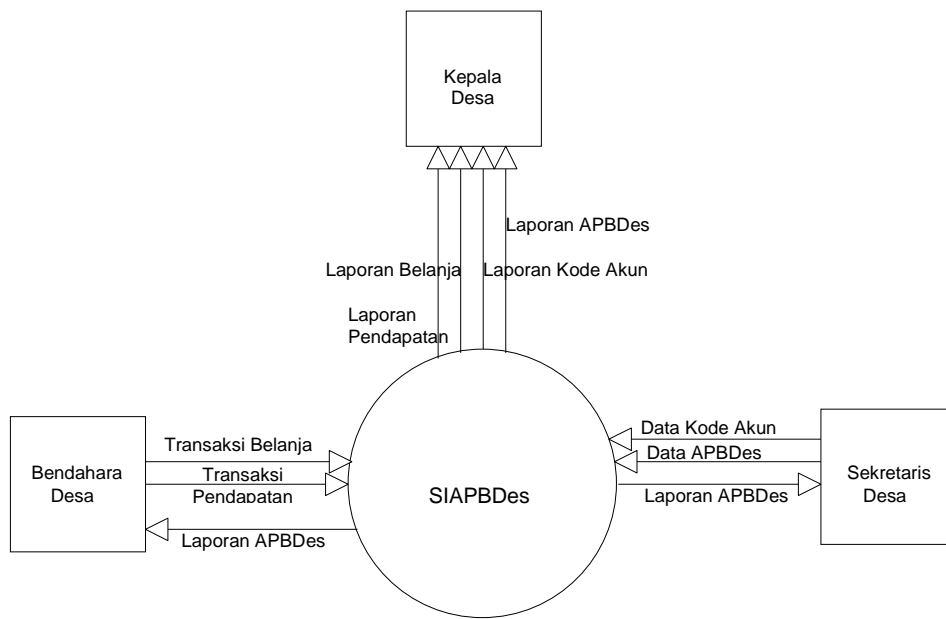
#### **3.6. Uji Coba Produk**

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap produk yang telah di validasi dan revisi. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi apakah sistem kerja yang baru dapat diterapkan untuk membantu dan memudahkan dalam mengelola aset tetap dan menghasilkan laporan aset tetap perusahaan.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Data Flow Diagram (DFD)**

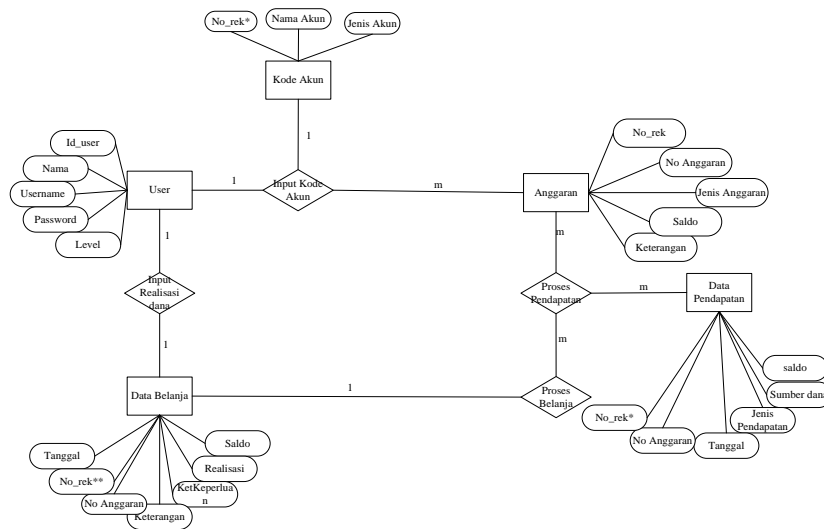
Data flow diagram (DFD) menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis, yang meliputi sumber dan tujuan data, arus data, proses transformasi data, dan penyimpanan data [12]. DFD merupakan cara yang sangat alamiah untuk mendokumentasikan proses, dan dapat dibuat dalam suatu hierarki untuk menyajikan berbagai tingkat rincian. Perancangan sistem informasi terdiri dari dua entitas yaitu : *Leader* dan *Owner*, masing-masing entitas memiliki akses yang berbeda. Entitas *Leader* memiliki hak akses untuk menangani seluruh transaksi yang ada pada sistem informasi, meliputi input data master berupa input data akun, data APBDes, data belanja, dan data pendapatan, entitas leader juga memiliki hak akses untuk melihat laporan. Entitas *Owner* hak akses berupa melihat output sistem berupa laporan data akunt, laporan pendapatan, laporan belanja, dan laporan APBDes.



Gambar 1. Data Flow Diagram dari sistem

**4.1. Entity Relation Diagram (ERD)**

Salah satu tools diagram yang digunakan untuk memodelkan konseptual data, ERD merupakan tools yang digunakan untuk melakukan pemodelan data secara abstrak dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan struktur dari data yang akan digunakan dan hubungan antara entitas (*relationship*) [13]. *Entity relationship diagram* pada perancangan sistem informasi menghasilkan sebanyak 5 *entity* (tabel) dan relasi antar tabel sebagaimana yang tampak pada gambar 2.



Gambar 2. Entity Relation Diagram dari sistem

**4.2. Tampilan Interface Sistem**

Tampilan antar muka (*interface*) menjadi media komunikasi antara pemakai (*user*) dari sistem dengan aplikasi yang digunakan, suatu tampilan antar muka memaut begitu banyak fasilitas tergantung pada kompleksitas dari suatu sistem, yang dapat diakses oleh pengguna didasarkan atas hak akses yang dimiliki pengguna.

**4.2.1. Tampilan Awal Sistem**



Gambar 3. Tampilan Awal

4.2.2. Tampilan Data Kode Akun

No Rek	Jenis Akun	Nama Akun	Option
2210	Belanja	Jaminan Kesehatan	[Edit] [Delete]
2200	Belanja	Tunjangan kades dan Perangkat Desa	[Edit] [Delete]
2110	Belanja	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	[Edit] [Delete]
2100	Belanja	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	[Edit] [Delete]
2000	Belanja		[Edit] [Delete]
1300	pendapatan	Pendapatan Bagi hasil Pajak	[Edit] [Delete]
1200	pendapatan	Pendapatan Asli Desa	[Edit] [Delete]
1100	pendapatan	Pendapatan Transfer	[Edit] [Delete]

Gambar 4. Data Kode Akun

4.2.3. Tampilan Data Anggaran

No Anggaran	No Rek	Jenis Anggaran	Saldo	Keterangan	Option
7	2323	Perangko dan material benda pos lain	Rp 240.000	belanja habis pakai	[Edit] [Delete]
6	2322	Belanja habis pakai	Rp 243.000	Alat Kebersihan Kantor	[Edit] [Delete]
5	2321	Alat Tulis Kantor	Rp 1.066.000	Belanja Alat Tulis Kantor	[Edit] [Delete]
4	2330	penghasilan pada masa kerja 20th/lebih	Rp 6.000.000	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	[Edit] [Delete]
3	2220	Jaminan Ketenagakerjaan	Rp 13.023.276	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	[Edit] [Delete]
2	0	jaminan kesehatan	Rp 6.262.000	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	[Edit] [Delete]
1	2110	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	Rp 208.740.000	Penghasilan kades dan perangkat desa	[Edit] [Delete]
Total Saldo Anggaran			Rp 235,574,276		

Gambar 5. Data Anggaran

#### 4.2.4. Tampilan Data Pendapatan

No. Rek	Tanggal	Jenis Pendapatan	Saldo	Option
1200	22-12-2017	pendapatan hasil pologoro	Rp 1.200.000	[Edit] [Delete]
1100	10-09-2017	pendapatan transfer	Rp 281.265.000	[Edit] [Delete]
Total saldo Pendapatan			Rp 282,465,000	

Gambar 6. Data Pendapatan

#### 4.2.5. Tampilan Data Belanja

No Rek	Nomor Kwitansi	Tanggal	Keterangan	Keterangan Detail	Realisasi	Option
1001	2344	10-12-2017	bayar air	bayar air PAM	Rp 20.000	[Edit] [Delete]
2313	2343	03-12-2018	Belanja Barang dan Jasa	belanja air	Rp 5.000.000	[Edit] [Delete]
2314	2342	01-09-2018	Belanja Barang dan Jasa	Bayar listrik bulan Januari	Rp 56.000	[Edit] [Delete]
2386	2341	06-01-2018	Intensif RT	Intensif untuk 11 ketua RT	Rp 2.475.000	[Edit] [Delete]
2200	2340	05-01-2018	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Perangkat Desa @ 45000, 10 Perangkat	Rp 450.000	[Edit] [Delete]
Sisa saldo					Rp 266,089,800	

Gambar 7. Data Belanja

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan atas hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan pada Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa, maka dapat disimpulkan, (1) Dengan adanya sistem ini dapat membantu Bendahara desa dan Sekretaris desa menghasilkan informasi keuangan desa lebih efektif dan efisien (2) Dengan sistem ini pembuatan laporan akan lebih teratur karena pencatatan dilakukan terus menerus (3) Sistem ini penyajian laporan APBDesa lebih teratur, jelas, cepat dan tepat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Yulianeu and C. Tohir, "Aplikasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Menggunakan Metode Accrual Basic di Desa Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya," *J. Manaj. Inform.*, 2017, [Online]. Available: <http://jurnal.stmik-dci.ac.id/index.php/jumika/article/view/37>.
- [2] I. R. Bawono and E. Setiyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT. Grasindo, 2019.
- [3] Widdy Yuspita Widiyaningrum and Wiguna, "Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Selaawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut," *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintah. Semesta)*, vol. 2, no. 2, pp. 97–118, 2021, doi: 10.47431/governabilitas.v2i2.118.
- [4] A.-B. bin Ladjumudin, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- [5] L. Puspita and S. D. Anggadini, *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- [6] JDIH BPK, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa," *Peraturan.Bpk.Go.Id*, vol. 51, no. 1, p. 51, 2014, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.

- [7] N. Argreshy, “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Kanawatu Kabupaten Luwu Timur Di Tengah Pandemi Covid-19,” *J. Econ. Bosowa*, vol. 7, no. 004, pp. 188–200, 2021.
- [8] D. Muhtada, A. Diniyanto, and G. Qory Alfana, “Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, Dan Solusi Strategis,” *RISTEK J. Riset, Inov. dan Teknol. Kabupaten Batang*, vol. 2, no. 2, pp. 29–44, 2018, doi: 10.55686/ristek.v2i2.34.
- [9] Erlina, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, 1st ed. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- [10] S. Karlinayani and E. S. Ningsih, “Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues),” *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 3, no. 2, pp. 309–316, 2018.
- [11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- [12] M. B. Romney and P. J. Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- [13] S. Mulyani, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah: Notasi Pemodelan Unified Modeling Language (UML)*, Edisi Kedu. Bandung: Abdi Sistematika, 2016.